



Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dalam Pelaporan Keuangan Pada Biro Keuangan Dan Aset Kementerian Dalam Negeri

Willy Dozan^{1*}, Triyuni Soemartono², Roy Tumpal Pakpahan³

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

*Corresponding Author: wildoz.wildoz@gmail.com

Submit: 1 Mei 2025, Diterima: 1 Juni 2025, Terbit: 30 Juni 2025

Abstrak

Tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada pentingnya sistem aplikasi yang efisien dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, khususnya dalam menghadapi transformasi sistem yang diimplementasikan melalui Aplikasi SAKTI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akseptansi pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI di Biro Keuangan dan Aset Kemendagri dengan menggunakan indikator pada Teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT).

Bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kritis dengan desain penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui wawancara dan studi literasi. Subjek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, dan melibatkan 11 informan pengguna Aplikasi SAKTI dari 68 orang yang terlibat.

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptansi pengguna terhadap Aplikasi SAKTI bervariasi, dengan klasifikasi akseptansi netral, positif, dan negatif. Variasi ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kemampuan SDM dalam menghadapi transformasi sistem, kondisi lingkungan kerja, dan beban kerja. Untuk mengatasi akseptansi negatif, strategi yang disarankan mencakup pembaruan utilitas Aplikasi SAKTI, peningkatan tata kelola implementasi, serta penguatan dukungan internal di tingkat instansi.

Kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Aplikasi SAKTI dan meningkatkan efektivitas implementasi sistem aplikasi keuangan di lingkungan pemerintah.

Kata kunci: Implementasi, Aplikasi SAKTI, akseptansi pengguna, transformasi sistem, UTAUT, Biro Keuangan, Aset Kemendagri.

Abstract

Study purpose. This research discusses the implementation of the Financial Application System at the institutional level (SAKTI) in financial reporting, particularly in the context of facing the system transformation implemented through the SAKTI Application. The purpose of this study is to analyze user acceptance of the implementation of the SAKTI Application at the Bureau of

Finance and Assets of the Ministry of Home Affairs, using indicators from the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).

Material and methods. This study uses a critical theory approach with a descriptive qualitative research design, conducted through interviews and literature study. The research subjects were selected using purposive sampling, involving 11 informants who are users of the SAKTI Application out of 68 individuals involved. The results of the study indicate that user acceptance of the SAKTI Application varies, classified as neutral, positive, and negative acceptance. This variation is influenced by differences in the ability of human resources to face system transformation, work environment conditions, and workloads. To address negative acceptance, the suggested strategies include updating the utility of the SAKTI Application, improving implementation governance, and strengthening internal support at the institutional level.

Cunclotion. This research is expected to contribute to the development of the SAKTI Application and improve the effectiveness of the implementation of financial application systems in the government environment.

Keywords: Implementation, SAKTI Application, user acceptance, system transformation, UTAUT, Bureau of Finance and Assets, Ministry of Home Affairs.

DOI: <https://doi.org/10.52188/jeas.v6i2.1371>

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berdampak signifikan terhadap perkembangan organisasi (Rohida, 2018:114-136; Sunarto, 2020:397-407). Kemajuan teknologi informasi memicu perubahan yang memungkinkan aktivitas dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini terbukti melalui reformasi teknologi informasi yang tidak hanya diterapkan pada sektor privat, tetapi juga dikembangkan di sektor publik.

Pada era modern, perkembangan teknologi informasi di sektor publik menjadi suatu kewajiban untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Sebagaimana diungkapkan oleh Eggers dan Bellan (2015) dalam jurnal mereka, *The Journey to Government Digital Transformation*, transformasi pengelolaan sektor publik tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, tetapi juga merupakan keharusan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Pemerintah sebagai sektor publik menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan aspek penting untuk mendukung terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya mendorong *good governance*, pemerintah berupaya menyelaraskan pelayanan publik melalui penerapan teknologi berbasis layanan elektronik, yang dikenal sebagai *e-government*. Salah satu implementasi *e-government* dalam bidang keuangan adalah model *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS), yang bertujuan mengatasi kendala yang muncul dari sistem manual atau tidak terintegrasi.

Kendala tersebut meliputi keterlambatan data pendapatan dan belanja dalam pelaporan, perencanaan, serta pengawasan, yang berdampak pada buruknya pengelolaan anggaran secara keseluruhan (Munte, 2023:211-229). Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut.

Sistem pencatatan keuangan yang baik adalah sistem yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang terstruktur dan berkualitas (Ratifah & Ridwan, 2014:29-39). Jika suatu instansi tidak menerapkan sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik, hal tersebut dapat

mengakibatkan penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pencatatan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien (Ratu, 2021:7-15).

Pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara berbasis penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual, Kementerian Keuangan mengembangkan inovasi berupa aplikasi integrasi yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat, yaitu *Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi* (SAKTI).

Aplikasi SAKTI dirancang untuk mendukung setiap satuan kerja di tingkat kementerian/lembaga dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama aplikasi ini adalah menciptakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tertib. SAKTI memiliki beberapa fitur utama, seperti basis data yang terintegrasi, *single entry point*, akuntansi berbasis akrual, serta keamanan data yang terjamin.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) telah diterapkan sejak bulan Desember 2015 oleh beberapa satuan kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Berpedoman pada Pasal 102 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021), Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah menggunakan SAKTI sejak tahun anggaran 2022 dalam pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporannya.

Implementasi suatu sistem maupun aplikasi pada indikator keberhasilannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Begitu pula dengan indikator kegagalan dalam implementasi suatu sistem maupun aplikasi. Kegagalan implementasi sistem informasi dibagi menjadi aspek teknis maupun nonteknis. Aspek teknis adalah hal yang berkaitan dengan sistem, seperti kualitas teknis sistemnya. Sedangkan aspek nonteknis adalah hal yang berkaitan dengan persepsi pengguna sistem informasi untuk ingin atau tidak ingin menggunakan sistem informasi (Jogiyanto, 2007:235).

SAKTI merupakan aplikasi berskala nasional yang dalam proses penciptaannya tidak mudah. Walaupun demikian, aplikasi tersebut belum tentu berhasil dalam proses implementasinya. Suatu sistem informasi atau aplikasi dalam proses implementasinya kemungkinan dapat mengalami permasalahan. Oleh karena itu, penelitian terkait implementasi Aplikasi SAKTI perlu dilakukan karena dalam proses perubahan diperlukan pembaruan dan penyempurnaan untuk mencapai proses kematangan suatu aplikasi, maka dari itu kualitas aplikasi berbasis web sangat diperlukan untuk menunjang aplikasi itu sendiri maka perubahan besar sering kali dimulai dari perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu (Nurudin et al, 2019:143-144).

Selain itu, terlepas dari kecanggihan teknologi yang disediakan oleh aplikasi SAKTI, keberhasilan implementasi dan penggunaannya sangat bergantung pada SDM yang ada di dalam organisasi. SDM menjadi jantung dari setiap transformasi sistem. Mereka bertanggung jawab untuk memahami, mengadopsi, dan mengelola teknologi baru tersebut. Kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan secara optimal fitur-fitur atau utilitas yang disediakan oleh aplikasi SAKTI menjadi faktor kunci dalam kesuksesan transformasi tersebut.

Biro Keuangan dan Aset merupakan salah satu satuan kerja yang ada di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menerapkan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi menggunakan sistem terintegrasi (SAKTI). Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900-174 BKA tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdapat 66 Orang *User* Pengguna diantaranya yaitu Kuasa Pengguna Aset (KPA), Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator pembayaran, Operator Pelaporan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan masing masing *user* diberikan jabatan *approver*, *validator* dan *operator* sesuai dengan SK tersebut.

Suatu instansi perlu memandang bahwa implementasi suatu sistem dapat diterima dengan baik atau sebaliknya untuk mengukur keberhasilan implementasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis tingkat akseptansi pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI pada Organisasi Biro Keuangan dan Aset, serta mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi akseptansi negatif dalam implementasinya. Melalui penelitian ini, tingkat akseptansi pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI dapat diketahui, sekaligus solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan atau rekomendasi dalam merumuskan kebijakan maupun strategi untuk mengantisipasi potensi masalah di masa mendatang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dalam Pelaporan Keuangan Pada Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri”**

Teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT)

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah model yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu sistem (Venkatesh et al., 2003:425-475). Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan pengguna dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions*, dan *behavioral intention*.

Performance expectancy merujuk pada keyakinan pengguna bahwa sistem dapat membantu meningkatkan kinerja mereka. *Effort expectancy* berkaitan dengan kemudahan dalam penggunaan sistem, yang memengaruhi keinginan pengguna untuk memanfaatkan teknologi tersebut. *Social influence* mencerminkan pengaruh sosial dari lingkungan atau individu lain yang mendorong pengguna untuk mengadopsi sistem. *Facilitating conditions* menunjukkan keyakinan bahwa implementasi sistem didukung oleh fasilitas teknis serta sarana dan prasarana yang memadai. Terakhir, *behavioral intention* menggambarkan niat dan intensitas pengguna dalam menggunakan sistem, berdasarkan evaluasi mereka terhadap manfaat dan pengalaman saat menggunakan teknologi tersebut.

UTAUT tidak hanya mendeskripsikan minat pengguna, tetapi juga perilaku mereka dalam memanfaatkan teknologi, sehingga model ini relevan untuk mengevaluasi penerimaan dan keberhasilan implementasi sistem informasi.

Bahan dan Metodologi

Sampel

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling. Objek dalam penelitian ini yaitu tempat, pelaku maupun aktivitas yang berada di Lingkup Organisasi Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan informan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor 900-174 BKA tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor 900.05-408 tentang Penetapan *User Approver*, Validator, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. Dari jumlah 68 Orang Informan pengguna Aplikasi SAKTI, yang diwawancarai peneliti sejumlah 11 Orang.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	Dra. Marlina Agus Setianingsih, MM	Validator	PPK
2.	Dra. Yuniar Prastuti, MA	Approver	PPSPM
3.	Aunur Rofiq, A.Md. Ak	Admin, Operator Pelaporan	Admin, Operator GLP
4.	Fransiska Aprilia Simamora, A.Md. Ak	Operator Pembayaran dan Komitmen	Bendahara Pengeluaran

5. Ikhwan Al- Shafa	Operator Penerimaan	Bendahara Penerimaan
6. Kresna Bayu Widyacastrena	Operator Pembayaran dan Komitmen	Operator SPM
7. Gede Ali Saputra	Operator Aset	Operator Aset
8. Ari Wibowo	Operator Persediaan	Operator Persediaan
9. Budiyono, S.E, M.Si	Approver Persediaan	Approver Persediaan
10. Afifah Rahayu, A.P.Kb.N	Operator Pembayaran dan Komitmen	BPP
11. Sri Wijayanti	Operator Pembayaran dan Komitmen	BPP
12. Tri Widodo	Operator Pembayaran dan Komitmen	BPP
13. Bren Eisen Hower	Operator Anggaran	Operator Anggaran

Organisasi penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan dengan teori kritis (*critical theory*). Alasan pemilihan tersebut dilihat dari permasalahan yang diteliti, pendekatan dengan teori kritis (*critical theory*) lebih mendominasi yang membawa peneliti pada pemikiran bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan peneliti dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi literasi. Wawancara dilakukan pada Organisasi Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri sebagai lokasi penelitian. Hasil wawancara merupakan data yang memberikan informasi terkait akseptansi pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI pada Organisasi Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri.

Instrument

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung tapi belum diolah atau bersifat mentah. Data primer dapat berupa wawancara, pengisian kuesioner, observasi (Schindler, 2019). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini melalui kajian literatur yang berkaitan dengan implementasi Aplikasi SAKTI. Penelitian ini menggunakan Teknik berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan.\

Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell (2014), dimulai dengan mengolah data wawancara melalui transkripsi untuk memudahkan analisis. Data yang telah tersusun kemudian dibaca secara menyeluruh untuk memperoleh gagasan umum mengenai akseptansi implementasi Aplikasi SAKTI, permasalahan yang dihadapi, dan solusi potensial. Selanjutnya, data dianalisis secara rinci melalui proses coding, di mana gagasan inti diidentifikasi dan dikembangkan menjadi kode-kode yang merepresentasikan keadaan dan gagasan analisis. Kode-kode ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara detail dan diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif, mencakup akseptansi pengguna, kendala implementasi, serta strategi penyelesaian. Tahapan akhir adalah interpretasi data yang dimulai dari pengolahan hingga penyajian, dengan hasil wawancara diinterpretasikan melalui transkrip, tabel koding, dan analisis berbasis Teori UTAUT untuk setiap dimensi berdasarkan data primer dan sekunder.

Hasil

1. Akseptasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Penggunaan terhadap sistem informasi yang baru memiliki berbagai persepsi. Persepsi tersebut merupakan bentuk akseptansi sistem yang diterima oleh pengguna terhadap teknologi yang dikembangkan. Peneliti telah menggali informasi mengenai penerimaan Aplikasi SAKTI melalui *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions* dan *behavior intention*. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti membagi menjadi 3 jenis akseptasi pengguna Aplikasi SAKTI yaitu akseptansi netral, positif dan negatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI pada Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri.

a. Akseptansi Netral

Pada akseptansi Aplikasi SAKTI di Biro Keuangan dan Aset Kemendagri ini, peneliti menemukan beberapa isu netral mengenai kemudahan dan manfaat dalam mendukung kinerja pengguna untuk mengelola keuangan. Selain itu, isu netral lainnya adalah Aplikasi SAKTI tetap digunakan namun dengan adanya perbaikan. Pada Tabel 2 merupakan hasil koding dan sintesis berdasarkan jawaban informan ketika dilakukan wawancara

Tabel 2. Isu Netral Pengguna

No.	Koding	Sintesis
1.	SAKTI mempermudah pekerjaan namun ada kekurangan	Mempermudah dan memberikan manfaat
2.	Pengguna berharap SAKTI tetap digunakan namun dengan perbaikan	SAKTI tetap digunakan namun perlu perbaikan

Akseptansi terhadap Aplikasi SAKTI di lingkungan Biro Keuangan dan Aset Kemendagri secara umum dinilai memberikan kemudahan dan manfaat bagi proses kerja. Informan menyebutkan bahwa SAKTI mampu mempermudah dan mendukung pekerjaan karena modul-modulnya yang saling terintegrasi. Salah satu informan menilai bahwa kehadiran SAKTI membantu dalam integrasi proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Modul-modul dalam SAKTI memungkinkan penggunaan APBN dibagi berdasarkan fungsi masing-masing. Namun, ia juga menggarisbawahi adanya kekurangan, seperti format hasil cetak Excel pada Rencana Penarikan Dana dan Rincian Kertas Kerja yang dinilai belum sederhana. Informan berharap agar pengembang aplikasi dari Kementerian Keuangan dapat melakukan pembaruan sesuai kebutuhan pengguna.

Pendapat serupa diungkapkan oleh informan lain, yang menilai bahwa Aplikasi SAKTI sudah cukup membantu dibandingkan dengan sebelum aplikasi ini ada. Namun, ia mencatat bahwa penggunaan SAKTI masih menghadapi kendala dan membutuhkan perbaikan. Ia menambahkan bahwa aplikasi idealnya mencapai kematangan setelah melalui masa uji coba minimal lima tahun, sedangkan SAKTI baru berjalan dua tahun di kantornya. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah kemudahan dalam penginputan data, karena revisi data yang sudah diinput masih tergolong sulit.

Sejalan dengan itu, informan lain yang menggunakan SAKTI dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) juga menyatakan bahwa aplikasi ini telah mempermudah pekerjaannya. Namun, ia mengusulkan perbaikan, terutama pada fitur pelaporan. Menurutnya, pengembangan yang diperlukan mencakup fitur pelaporan detail transaksi yang menampilkan rekapitulasi per akun, karena hingga saat ini fitur tersebut belum tersedia.

b. Akseptansi Positif

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam wawancara bersama informan terkait akseptansi Aplikasi SAKTI, peneliti mengelompokkan beberapa isu yang bermakna

positif terhadap penerimaan implementasi Aplikasi SAKTI di Biro Keuangan dan Aset Kemendagri ke dalam coding sesuai pada Tabel 3.

Tabel 3. Isu Positif Pengguna

No.	Koding	Sintesis
(1)	(2)	(3)
1.	Menyediakan dan memudahkan kebutuhan data yang diinginkan Data terintegrasi antar modul/ <i>single database</i> Membantu membuat pelaporan Aplikasi mempermudah pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual	Memberikan manfaat dan meningkatkan kinerja
2.	Tampilan menu mudah dipahami dan digunakan Panduan sudah tersedia	Mudah digunakan
3.	Aplikasi didukung oleh pemerintah untuk digunakan Kebijakan untuk digunakan pada semua tingkat Kementerian/ Lembaga Sarana dan Prasarana sudah menunjang Jaringan internet sudah menunjang Bantuan SDM dari Kemenkeu saat ada kendala dalam penggunaan aplikasi Tersedia grup konsultasi dari KPPN Ada sosialisasi dan Bimtek	Lingkungan mendukung
4.	Aplikasi digunakan sehari-hari dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran Pengguna merasa nyaman	Ada niat menggunakan
5.	Pengguna diwajibkan menggunakan Aplikasi SAKTI Pengguna menaati kebijakan	Ada imbauan
6.	Aplikasi lebih baik dari sistem sebelumnya	Sesuai teknologi terkini

Akseptansi Aplikasi SAKTI di lingkungan Biro Keuangan dan Aset Kemendagri dinilai memberikan manfaat signifikan dan meningkatkan kinerja penggunanya. Dengan menyediakan data yang terintegrasi antar modul, aplikasi ini mempermudah proses pembuatan dan pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual. Informan menyampaikan bahwa aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bekerja lebih cepat dan efisien karena data yang dibutuhkan dapat diakses langsung dari sistem tanpa perlu proses manual. Kemudahan dalam pelaporan keuangan, fleksibilitas akses, serta dukungan teknologi berbasis open platform membuat aplikasi ini sangat membantu dalam meningkatkan kinerja harian.

Selain itu, Aplikasi SAKTI menghadirkan inovasi dengan menggunakan database terpusat yang menjamin keamanan melalui fitur enkripsi dan dekripsi Arsip Data Komputer (ADK). Hal ini memberikan kenyamanan dalam penggunaan, termasuk pada perangkat dengan spesifikasi minimum. Integrasi aplikasi yang sebelumnya terpisah-pisah juga mempersingkat proses kerja, memungkinkan peningkatan kinerja dalam berbagai aspek pekerjaan.

Dari sisi kemudahan penggunaan, tampilan menu aplikasi dinilai intuitif dan mudah dipahami. Informan mengungkapkan bahwa panduan pengguna dan dukungan berupa grup konsultasi dari KPPN sangat membantu mereka dalam memahami dan mengimplementasikan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini dianggap user-friendly, dengan fitur berbasis satu database yang mendukung akuntansi berbasis akrual dari perencanaan hingga pelaporan keuangan.

Dukungan dari lingkungan kerja juga turut memperkuat implementasi Aplikasi SAKTI. Tersedianya fasilitas seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer dan laptop yang memadai, serta panduan dan pelatihan dari Kementerian Keuangan memastikan pengguna

dapat mengakses aplikasi ini dengan lancar. Jika menghadapi kendala, pengguna dapat meminta bantuan melalui layanan Hai DJP atau grup konsultasi KPPN, meskipun beberapa informan mencatat respons layanan ini terkadang lambat.

Dalam hal niat penggunaan, informan menunjukkan sikap positif terhadap implementasi Aplikasi SAKTI. Mereka merasa aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mendukung pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan keuangan, persediaan, dan aset. Dengan akseptansi yang tinggi, sebagian besar informan menyatakan akan terus menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku, mengingat manfaat yang telah dirasakan dalam mendukung tugas dan tanggung jawab mereka.

c. Akseptansi Negatif

Akseptansi negatif dari implementasi Aplikasi SAKTI hadir setelah pengguna menggunakan Aplikasi SAKTI. Beberapa informan yang merupakan pengguna dari aplikasi mengemukakan ketidakpuasan terhadap implementasi Aplikasi SAKTI, sehingga menimbulkan beberapa akseptansi negatif yang tersusun dalam Tabel 4.

Tabel 4. Isu Negatif Pengguna

No. (1)	Koding (2)	Sintesis (3)
1.	Tidak bisa menampilkan laporan rekapitulasi per akun Ada modul yang belum terintegrasi Belum lengkap pada menu laporan	Tidak memberikan manfaat
2.	Hasil cetak dan format Rincian Kertas Kerja belum sederhana Tidak bisa diedit apabila terdapat kesalahan Data <i>delay</i> Data ganda Data terkadang harus ditarik secara manual Keinginan pengguna belum terpenuhi Pekerjaan menjadi lambat	Tidak meningkatkan kinerja
3.	Tampilan menu sulit dipahami Tampilan menu terlalu rinci dan rumit Tidak praktis Pengguna kesulitan menginput Pengguna takut salah input Pengguna perlu adaptasi Panduan kurang detail Pengguna bingung karena transformasi informasi sulit Validasi dan OTP (<i>One Time Password</i>) membutuhkan koordinasi yang tinggi	Ada kesulitan
4.	Sarana dan Prasarana belum menunjang Jaringan internet belum menunjang Aplikasi sering mengalami <i>maintenance</i> Tidak ada bantuan SDM pada instansi saat ada kendala dalam penggunaan aplikasi	Lingkungan tidak mendukung
5.	Aplikasi perlu perbaikan Aplikasi belum berjalan maksimal	Perlu diperbarui

Implementasi Aplikasi SAKTI menurut beberapa informan memberikan manfaat dalam meningkatkan proses kinerja pengelolaan keuangan. Namun, sejumlah informan juga mengungkapkan bahwa aplikasi ini belum sepenuhnya optimal, terutama pada bagian tertentu.

Dalam konteks *performance expectancy*, misalnya, beberapa modul seperti modul persediaan dan aset belum terintegrasi dengan modul bendahara, sehingga manfaatnya dirasa kurang maksimal. Informan juga menyarankan pengembangan fitur pelaporan, seperti detail transaksi dan rekapitulasi akun, untuk meningkatkan kegunaan aplikasi di masa depan.

Beberapa kendala lain yang diidentifikasi meliputi format cetak dokumen seperti Rincian Kertas Kerja (RKK) yang belum sederhana, data yang terkadang harus ditarik secara manual, serta keterlambatan data yang menghambat efisiensi kerja. Selain itu, menu aplikasi yang sangat rinci dianggap memperlambat proses kerja, khususnya bagi pengguna bendahara pengeluaran yang kesulitan melakukan revisi jika terjadi kesalahan input. Integrasi data antara Aplikasi SAKTI dengan SPAN juga belum sepenuhnya sinkron, menyebabkan perbedaan data pada beberapa kesempatan.

Selain itu, aspek *effort expectancy* menunjukkan bahwa tampilan menu yang terlalu kompleks menyulitkan pengguna, terutama pada tahap awal implementasi. Pengguna merasa perlu beradaptasi dan membutuhkan panduan yang lebih rinci serta pelatihan teknis untuk memahami sistem ini. Kompleksitas input data, validasi, serta proses penggunaan OTP (*One Time Password*) menambah beban koordinasi antar pengguna. Informan juga mengeluhkan bahwa panduan yang disediakan masih kurang memadai, sehingga banyak pengguna merasa bingung.

Dalam hal *facilitating conditions*, permasalahan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurang stabilnya jaringan internet, seringnya aplikasi mengalami *maintenance*, serta tidak tersedianya bantuan teknis internal. Pengguna juga mencatat bahwa bantuan SDM yang ada hanya berasal dari grup KPPN atau layanan Hai DJP, yang sering kali membutuhkan waktu lama untuk merespons. Beberapa pengguna bahkan harus menggunakan perangkat pribadi karena kantor belum menyediakan fasilitas yang memadai.

Dari perspektif *behavior intention*, tingkat keinginan pengguna dalam menggunakan Aplikasi SAKTI masih dipengaruhi oleh kendala teknis yang ada. Informan menyampaikan bahwa aplikasi ini perlu perbaikan lebih lanjut, terutama dalam hal kemudahan penggunaan dan penyelesaian masalah teknis. Beberapa pengguna menyatakan bahwa meskipun mereka tetap menggunakan aplikasi ini karena kebutuhan kerja, berbagai kekurangan yang ada mengurangi efisiensi dan kenyamanan dalam penggunaannya.

2. Variasi Akseptansi

Variasi akseptansi pada beberapa informan yang menggunakan Aplikasi SAKTI di Biro Keuangan dan Aset Kemendagri dibagi menjadi akseptansi netral, positif dan negatif. Ketiga variasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan yang diterima oleh masing-masing pengguna dalam implementasi Aplikasi SAKTI. Perbedaan tersebut diukur sesuai indikator dalam Teori UTAUT yaitu *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions* dan *behavior intention*. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya perbedaan akseptansi dari pengguna yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

a. Tingkat Kemampuan SDM dalam Menghadapi Transformasi Sistem

Tingkat kemampuan SDM dalam menghadapi transformasi sistem saat implementasi Aplikasi SAKTI menunjukkan variasi antar pengguna. Beberapa pengguna mampu menerima transformasi sistem dengan baik dan beradaptasi lebih cepat dibandingkan yang lain. Sebagian informan menyatakan bahwa menu dalam aplikasi mudah dipahami jika pengguna bersedia mengeksplorasi fitur yang ada. Kemudahan ini didukung oleh struktur aplikasi yang mencakup pembukuan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Namun, tidak semua pengguna memiliki pengalaman serupa. Ada yang merasa bingung, terutama pada tahap awal implementasi, karena tidak semua pegawai diberikan pelatihan teknis terkait aplikasi ini. Proses transformasi informasi terhadap sistem baru juga diakui belum sepenuhnya dipahami

oleh sebagian pengguna. Perbedaan tingkat pemahaman ini mencerminkan akseptansi yang beragam dalam menghadapi perubahan sistem.

b. Kondisi Lingkungan Kerja

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya variasi terhadap akseptansi dari implementasi Aplikasi SAKTI yaitu kondisi lingkungan kerja yang mempengaruhi pengguna. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan pada ruangan kerja maupun fasilitas yang diberikan kepada masing-masing pengguna. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan pada ruangan kerja maupun masing-masing pengguna memiliki perbedaan karena masing-masing pengguna memiliki lokasi ruangan yang berbeda, bagian maupun subbagian yang berbeda serta tanggungjawab yang berbeda pada masing-masing jabatan yang diamanahkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana bagi pengguna Aplikasi SAKTI menunjukkan perbedaan yang signifikan. Beberapa pengguna telah menerima fasilitas yang memadai, seperti perangkat komputer dan jaringan yang stabil, sehingga menunjang pekerjaan mereka. Namun, ada juga pengguna yang belum mendapatkan fasilitas serupa. Sebagian informan menyampaikan bahwa ketersediaan perangkat seperti laptop atau PC belum mencukupi untuk semua pegawai, dan kualitas jaringan internet bervariasi di setiap ruangan kerja. Bahkan, beberapa pengguna harus menggunakan perangkat pribadi karena belum mendapatkan fasilitas dari kantor. Di sisi lain, ada juga informan yang menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana, termasuk jaringan dan perangkat kerja, telah dianggarkan secara rutin setiap tahun dan sudah memadai. Meski demikian, kendala pada aplikasi, seperti gangguan saat digunakan oleh banyak pengguna, masih menjadi masalah. Perbedaan kondisi fasilitas ini mencerminkan variasi lingkungan kerja yang berdampak pada tingkat akseptansi pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI.

c. Beban Kerja

Beban kerja yang berbeda pada masing-masing jabatan perbendaharaan menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi akseptansi pengguna. Masing-masing pengguna dengan jabatan perbendaharaan yang berbeda, sesuai yang tertera pada SK

Nomor 900-174 BKA tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Biro Keuangan dan Aset Kemendagri memiliki tugas yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan penggunaan modul yang digunakan dalam aplikasi berbeda sesuai dengan masing-masing jabatannya.

Modul berbeda yang digunakan pada masing-masing jabatan memberikan tampilan berbeda dan kebutuhan data yang berbeda, sehingga masing-masing pengguna dituntut untuk mempelajari serta menguasai modul sesuai jabatannya. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya variasi akseptansi antar pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI. Terjadinya variasi tersebut karena pengguna dalam mengakses maupun menggunakan menu, tampilan, input data, unduh data dari Aplikasi SAKTI memiliki rincian yang berbeda pada masing-masing modulnya.

3. Transformasi Mengatasi Akseptansi Negatif

Implementasi Aplikasi SAKTI tidak terlepas dari permasalahan teknis maupun nonteknis. Menghadapi permasalahan tersebut, perlu bagi Biro Keuangan dan Aset Kemendagri untuk melakukan transformasi dalam mengatasi akseptansi negatif dari pengguna Aplikasi SAKTI. Berbagai cara untuk menghadapi transformasi tersebut yaitu:

a. Memperbarui Utilitas Aplikasi SAKTI

Implementasi sistem informasi dipengaruhi oleh penerimaan dan penggunaan manusia yang menggunakannya (Raharjo, et al, 2016; Sutanto, et al., 2018). Suatu sistem diterima dengan baik apabila penggunaannya mendapat manfaat dari sistem tersebut (Saputra, 2016; Kamayanti, 2019).

Implementasi Aplikasi SAKTI pada Biro Keuangan dan Aset Kemendagri diharapkan mampu memberikan manfaat, meningkatkan kinerja, menyediakan kebutuhan data dan output yang dibutuhkan pengguna, mempermudah kesulitan sebelumnya, menyediakan akses yang baik dan tepat, meningkatkan akurasi, memberikan fleksibilitas terhadap pembaruan, meningkatkan kecepatan akses, mampu mengatasi banyaknya data atau informasi untuk pengguna, mudah dipahami, memiliki data dan informasi yang seragam.

Output dari Aplikasi SAKTI harus praktis, sederhana sehingga mudah digunakan dan menunjang kebutuhan pengguna seperti mampu menampilkan laporan rekapitulasi per akun, menyediakan hasil cetak dan format Rincian Kertas Kerja (RKK) yang sederhana, menyediakan keseragaman antar modul yang belum terintegrasi seperti fitur dan rincian yang seragam antar modul yang terintegrasi. Faktualnya, Aplikasi SAKTI masih belum mampu untuk menyediakan kebutuhan pengguna sehingga pengguna masih belum mendapatkan manfaat dari segi output.

Penerapan IFMIS khususnya dalam penelitian ini adalah Aplikasi SAKTI, harus mampu memberikan kemudahan dalam menunjang pekerjaan sehari-hari serta harus mampu mengatasi kendala yang terjadi pada proses pengelolaan keuangan pada instansi. Adanya pembaruan terhadap utilitas dari Aplikasi SAKTI akan memaksimalkan implementasi dari aplikasi tersebut. Hal ini karena pembaruan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akan memberikan manfaat dan meningkatkan kinerja pengguna dalam menunjang pekerjaannya, sehingga akseptansi pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI akan bernilai positif. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam penelitian Nurvitasari & Dwijayanti (2021) yaitu harapan kemudahan serta fitur layanan berpengaruh terhadap minat penggunaan sistem informasi. Ketersediaan fitur merupakan faktor utama yang mempengaruhi penggunaan sistem (Ahmad & Pambudi, 2013).

Pembaruan Aplikasi SAKTI dapat dilakukan melalui upgrading aplikasi dengan versi tertentu, sehingga ketika ada masalah maupun kekurangan dari Aplikasi SAKTI versi sebelumnya, dapat diperbarui dengan versi aplikasi terbarunya. Hal ini dilakukan karena dalam transformasi teknologi berbasis aplikasi dibutuhkan fleksibilitas untuk mengikuti kesesuaian kebutuhan, perkembangan kebijakan dan zaman. Dengan memahami kebutuhan pengguna maka akan membuat IFMIS mendapatkan nilai positif dalam penerimaannya.

b. Meningkatkan Tata Kelola Implementasi Aplikasi SAKTI

Tata kelola implementasi IFMIS (*Integrated Financial Management System*), yang dalam penelitian ini dilakukan dengan fokus pada implementasi Aplikasi SAKTI merupakan tanggung jawab pimpinan maupun manajemen. Perlu adanya kesadaran peran dan tanggung jawab terhadap implementasi teknologi informasi agar sesuai dengan tujuan organisasi (Maskur, et al., 2017).

Implementasi aplikasi ini merupakan kewajiban bagi kementerian/ lembaga yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, sehingga penggunaan aplikasi ini perlu didukung oleh tata kelola teknologi informasi pada instansi diimplementasikannya IFMIS. Teknologi informasi yang dikelola dengan baik menjamin penyelenggaraan sistem informasi yang kontributif terhadap strategi dan tujuannya (Azzizah, et al., 2021).

Implementasi tata kelola diperlukan adanya struktur organisasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan kerangka kerja dalam tata kelola (Menteri Kesehatan, 2013). Struktur

organisasi pada Biro Keuangan dan Aset sudah terbentuk sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengatasi kendala dalam teknologi informasi dan kerangka kerja dalam tata kelola implementasi Aplikasi SAKTI belum tersedia, sehingga penting Biro Keuangan dan Aset untuk membangun SDM yang mampu mengelola teknologi informasi dan kerangka kerja kontrol tata kelola yang berkaitan dengan implementasi Aplikasi SAKTI. Tanuwijaya menyampaikan bahwa teknologi informasi dapat berjalan dengan baik apabila tersedianya kerangka kerja dalam mendampingi implementasi teknologi informasi tersebut. Selain itu, kerangka kerja juga bermanfaat untuk meminimalisir risiko dalam pengelolaan teknologi informasi dan sumber daya di dalamnya secara tanggung jawab (Tanuwijaya, 2010). Hal ini harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI, sehingga IFMIS menjadi efektif dan bermanfaat bagi pengguna dan dapat meningkatkan kinerja pengguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

c. Meningkatkan Dukungan Internal

Minat pengguna menggunakan suatu sistem maupun aplikasi dipengaruhi oleh kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Perlu bagi suatu sistem maupun aplikasi untuk meningkatkan kualitas sistem, layanan maupun informasinya. Pengguna yang tidak memahami penggunaan sistem informasi akan cenderung demotivasi dan tidak mampu bekerja optimal. Hal ini didukung oleh pernyataan Andriati bahwa perusahaan yang kompeten secara digital, perlu mengembangkan serta melatih karyawannya agar termotivasi dan dapat bekerja secara optimal untuk perusahaan (Andriati, et al., 2020). Manfaat yang diperoleh dengan mengimplementasikan literasi digital yaitu meningkatkan motivasi bagi karyawan dan meningkatkan produktivitas (Suherdi, 2021).

Dukungan internal instansi merupakan strategi penting dalam mengatasi akseptansi negatif terhadap implementasi Aplikasi SAKTI. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh pengguna Aplikasi SAKTI di lingkungan kerja Biro Keuangan dan Aset. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap sistem baru melalui pelatihan teknis dan praktik langsung. Seperti disampaikan oleh seorang informan, kurangnya panduan yang detail menjadi salah satu penyebab kebingungan pengguna, terutama bagi mereka yang belum pernah menggunakan aplikasi serupa. Dengan mengadakan bimtek, kesulitan dalam memahami transformasi informasi dapat diatasi, sehingga pengguna lebih siap dalam menggunakan aplikasi ini.

Selain itu, instansi juga dapat membentuk grup WhatsApp internal khusus untuk memberikan bantuan terkait kendala implementasi Aplikasi SAKTI. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada layanan eksternal seperti Hai DJP atau grup WhatsApp KPPN, yang responsnya sering kali lambat. Ketergantungan tersebut berdampak negatif pada kinerja pengguna karena solusi atas kendala yang mereka hadapi tidak bisa segera diperoleh. Sebagai ilustrasi, beberapa informan menyebutkan bahwa bantuan internal saat ini belum tersedia, sehingga mereka harus bergantung pada grup KPPN, yang tidak selalu memberikan respon cepat. Dengan adanya grup internal, pengguna dapat mengakses bantuan lebih efektif dan efisien, sehingga kendala dapat segera diatasi.

Strategi lainnya adalah meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI. Penyediaan perangkat seperti laptop, PC, serta peningkatan kecepatan jaringan merupakan langkah penting, mengingat beberapa pengguna masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Seperti disampaikan oleh seorang informan, tidak semua pegawai mendapatkan perangkat seperti laptop atau komputer dari instansi, dan kondisi jaringan di setiap ruangan juga belum merata. Beberapa bahkan harus menggunakan perangkat pribadi untuk menyelesaikan tugas mereka. Dengan mengatasi kekurangan fasilitas ini, instansi dapat memastikan lingkungan kerja yang lebih mendukung bagi para pengguna.

Langkah-langkah strategis ini tidak hanya memberikan solusi atas kendala teknis, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pengguna, sehingga implementasi Aplikasi SAKTI dapat berjalan lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akseptansi pengguna terhadap implementasi Aplikasi SAKTI Biro Keuangan dan Aset Kemendagri, yang diukur menggunakan indikator pada Teori UTAUT, menunjukkan respon yang beragam, sehingga akseptansi pengguna diklasifikasikan menjadi netral, positif, dan negatif. Variasi akseptansi ini terjadi akibat perbedaan tingkat kemampuan SDM dalam menghadapi transformasi sistem, kondisi lingkungan kerja, dan beban kerja. Untuk mengatasi permasalahan akseptansi negatif, strategi yang dapat dilakukan meliputi pembaruan utilitas Aplikasi SAKTI, peningkatan tata kelola implementasi, serta penguatan dukungan internal instansi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain, pertama, Aplikasi SAKTI memerlukan pengembangan, khususnya pada fitur kontrol atas rencana penarikan dana bulanan untuk setiap rincian output, agar unit kerja dapat membuat dokumen pertanggungjawaban yang lebih memudahkan pengguna. Kedua, Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi yang menjadi subjek implementasi Aplikasi SAKTI dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam menghadapi transformasi sistem, bersikap lebih agile dalam menghadapi kondisi lingkungan kerja dan beban kerja, sehingga tercapai akseptansi yang seragam dalam mendapatkan maturitas sistem yang baru. Ketiga, peneliti merekomendasikan beberapa langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, seperti memperbarui utilitas Aplikasi SAKTI, meningkatkan tata kelola implementasi Aplikasi SAKTI secara manajerial, dan meningkatkan dukungan internal untuk kelancaran kebijakan implementasi. Mengingat variasi akseptansi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan sebagai pionir dalam inovasi Aplikasi SAKTI, untuk melakukan pembaruan utilitas Aplikasi SAKTI yang didukung kesiapan SDM, tata kelola manajerial, serta sarana dan prasarana dari setiap satuan kerja yang mengimplementasikannya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, & Pambudi, B. S. (2013). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, keamanan dan ketersediaan fitur terhadap minat ulang nasabah bank dalam menggunakan internet banking (Studi pada program layanan Internet Banking BRI). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v8i1.589>
- Andriati, H. N., & Patma, K. (2020). Pelatihan literasi keuangan dan literasi digital kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kota/Kabupaten Jayapura. *Community Engagem. Journal. Commen*, 3, 33–41.
- Azzizah, M. I., Agitha, N., Bagus, I., & Widiartha, K. (2021). Analisis tata kelola teknologi informasi untuk mendefinisikan arsitektur informasi dengan framework COBIT 4.1 (Studi kasus instalasi rawat jalan RSUD Prov. NTB). *Journal Computer Science and Informatics Engineering*, 5, 101–110.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Eggers, W. D., & Bellan, J. (2015). *The journey to government's digital transformation*. Deloitte University Press.
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Sistem informasi keperilakuan*. Andi Offset.

- Kamayanti. (2019). [Judul buku tidak tersedia].
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). [Judul dokumen tidak tersedia].
- Maskur, Adolong, N., & Mokodongan, R. (2017). Implementasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 5 di BPMPTSP Bone Bolango. *Masyarakat Telematika dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8, 109–126. <https://doi.org/10.17933/MTI.V8I2.106>
- Menteri Kesehatan. (2013). [Judul peraturan tidak tersedia].
- Munte, A. Y., Perangin-Angin, P. G. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211–229.
- Nurudin, et al. (2019). [Judul tidak tersedia] (pp. 143–144).
- Nurvitasari, E., & Dwijayanti, R. (2021). Pengaruh persepsi kemudahan, fitur layanan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan aplikasi Grab (Studi pada pengguna aplikasi Grab fitur GrabFood). *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 9(3), 1472–1481.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Nomor 223 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*.
- Permendagri. (2021). *Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri*.
- Raharjo, B., Nugroho, H. A., & Winarno, W. W. (2016). Analisis faktor determinan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia dan implikasinya terhadap reformasi birokrasi pada BPK RI. *Jurnal Informatika Ahmad Dahlan*.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2014). Komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika Journal*, 11(1), 29–39.
- Ratu, L. (2021). Sistem informasi manajemen aset dan keuangan. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, 1(2), 7–15.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2010). *Qualitative research methods*. SAGE Publications, Inc.
- Rohida, L. (2018). Pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap kompetensi sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136.
- Suherdi, D. (2021). Peran literasi digital di masa pandemik. *Cattleya Darmaya Fortuna*.
- Sunarto, A. (2020). Pengembangan sumber daya manusia dengan berbasis inovasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 397–407.
- Sekretariat Jenderal. (n.d.). *Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor 900-174 BKA tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor 900.05-408 tentang Penetapan User Approver, Validator, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal*.
- Tanuwijaya, H., & Sarno, R. (2010). Comparison of COBIT maturity model and structural equation model for measuring the alignment between university academic regulations and information technology goals. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 10, 80.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–475.

Information about the authors:

Willy Dozan: wildoz.wildo@gmail.com, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

Triyuni Soemartono: admin@moestopo.ac.id, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Roy Tumpal Pakpahan: admin@moestopo.ac.id, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Cite this article as: Dozan, Willy. Et al. (2025). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dalam Pelaporan Keuangan Pada Biro Keuangan Dan Aset Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu Dan Akhlak Ahlusunah Wal Jama'ah*, 6(2). 216-230. <https://doi.org/10.52188/jeas.v6i2.1371>